

## Siaran Pers

### **PINA CENTER INISIASI PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR NON-ANGGARAN PEMERINTAH MELALUI INVESTASI SURAT BERHARGA PERPETUAL (SBP)**

**Jakarta, 17 April 2018** – Seiring dengan upaya untuk membangun infrastruktur melalui pembiayaan non-anggaran pemerintah, Kementerian PPN/Bappenas melalui Tim Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) terus melakukan upaya berkesinambungan melalui skema pembiayaan alternatif memanfaatkan dana-dana jangka panjang dari publik dalam pemenuhan pembiayaan pengembangan infrastruktur di seluruh Indonesia. Dari beragam spektrum yang menjadi perhatian dalam upaya membangun infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia secara merata, sektor ketenagalistrikan menjadi salah satu fokus utama dari upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui ketersediaan energi listrik yang memadai. Demi mewujudkan mimpi tersebut, pemerintah mendorong peran aktif BUMN dan swasta untuk turut serta mengembangkan sektor ini melalui skema bisnis *Independent Power Producer* (IPP).

Sebagai upaya mendukung pencapaian program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang merupakan salah satu program dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai dengan Peraturan Presiden No. 58 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Tim PINA tengah memfasilitasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Meulaboh 2x200 MW yang dibangun dengan skema IPP melalui konsorsium PT PP Energi, China Datang Overseas Investment Co. (CDTO), dan PT Sumberdaya Sewatama untuk mendapatkan pembiayaan alternatif yang bersumber dari dana non-anggaran pemerintah. Terhadap proyek ini, Tim PINA memfasilitasi penerbitan perdana instrumen finansial berupa Surat Berharga Perpetual (SBP) yang dianggap memiliki fitur yang sangat atraktif dalam pembiayaan investasi dari dana non-anggaran pemerintah.

Penerbitan Skema SBP merupakan sejarah baru di Indonesia dalam bidang instrumen investasi. SBP menawarkan instrumen non konvensional bagi para investor dana jangka panjang di Indonesia seperti asuransi, dana pensiun, dll. Dengan bergulirnya SBP, dana-dana jangka panjang dapat dialirkan langsung ke sektor riil melalui fitur *Mezzanine Financing*. Skema SBP yang diterbitkan oleh PT PP (Persero) Tbk ini tidak memiliki tanggal jatuh tempo, tanpa jaminan, dan memiliki fleksibilitas untuk melaksanakan opsi beli. Selain itu, skema ini tidak mengakibatkan dilusi saham, dan memperbaiki struktur modal pada suatu perusahaan. Investor tidak hanya mendapat pembayaran kupon secara rutin dengan imbal hasil yang atraktif, tetapi juga mendapatkan tambahan imbal hasil (*step-up rate*) setelah tahun ke-3 apabila PT PP (Persero) Tbk tidak melaksanakan opsi beli. Selain itu, SBP juga diperkaya dengan fitur *dividen pusher* yang menjadi jaminan pembayaran imbal hasil dari investasi ini.

Dalam Proyek PLTU Meulaboh, SBP akan diterbitkan oleh PT PP (Persero) Tbk selaku induk dari PT PP Energi. Jumlah dana yang diharapkan dapat dipenuhi melalui skema ini adalah berjumlah 8 (delapan) triliun rupiah dimana secara bertahap akan dipenuhi dalam periode 4 (empat) tahun, dengan alokasi dana tidak terbatas hanya pada proyek pembangkit ini, namun juga untuk pengembangan beberapa unit bisnis lainnya di dalam PT PP (Persero) Tbk. Kementerian BUMN sendiri memberikan dukungan secara penuh kepada PT PP (Persero) Tbk dengan dikeluarkannya surat persetujuan pemenuhan investasi sebesar 1 (satu) triliun rupiah pada tahap awal penerbitan instrumen ini.

Dengan penerbitan instrumen SBP ini, PT PP (Persero) Tbk akan menorehkan sejarah sebagai BUMN pertama yang menginisiasi bergulirnya SBP yang menjadi angin segar pengembangan infrastruktur di tengah keterbatasan anggaran pemerintah (ABPN/APBD). “Kami mengapresiasi dukungan dari Bappenas, Kemenko Perekonomian, Kementerian BUMN, dan OJK atas terwujudnya pendanaan alternatif melalui skema SBP ini,” ujar Direktur Utama PT PP (Persero) Tbk Tumiyana. “Pendanaan inovatif yang ditawarkan oleh instrumen SBP berpeluang untuk menciptakan ruang yang lebih besar lagi untuk pendanaan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia, yang mana bagi PT PP (Persero) Tbk kombinasi antara beragam metode pendanaan dengan kekuatan keuangan perusahaan serta kapasitas *engineering* yang ada akan membuka jalan yang lebih luas lagi bagi PT PP (Persero) Tbk di dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia,” Tumiyana melanjutkan. Pembelian SBP sendiri rencananya akan dilakukan melalui Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) sebesar 250 miliar rupiah yang dikelola oleh PT Ciptadana Asset Management, dengan potensi penambahan sebesar 1,3 triliun rupiah melalui Danareksa Capital.

“Skema investasi Surat Berharga Perpetual adalah suatu terobosan dalam menjawab tantangan pemerintah pada pembangunan infrastruktur secara masif di Indonesia. Hal ini tidak akan tercapai tanpa adanya kemauan dari berbagai kementerian dan lembaga untuk melakukan kolaborasi yang inklusif dengan mengedepankan kepentingan rakyat, terutama dari pihak OJK selaku regulator dari pasar keuangan di Indonesia,” ucap Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di acara Penandatanganan Akta Perjanjian Surat Berharga Perpetual antara PT PP (Persero) Tbk dengan Ciptadana di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (17/4).

Hal senada juga disampaikan oleh Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha BUMN, Aloysius Kiik Ro, yang sangat mendorong peran aktif BUMN dalam pemenuhan investasi melalui pemanfaatan dana-dana jangka panjang milik publik dengan menggunakan skema pembiayaan alternatif, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap APBN dalam menunaikan tugas-tugas pengembangan infrastruktur. “Surat Berharga Perpetual yang diterbitkan PT PP (Persero) pada PLTU Meulaboh diharapkan menjadi inspirasi bagi BUMN lainnya untuk mereplikasi konsep serupa pada proyek infrastruktur lain yang bersumber dari dana masyarakat dalam dan luar negeri, sehingga dapat menjadi solusi pemerintah dalam mencari pembiayaan alternatif yang berkelanjutan,” kata Aloysius di sela-sela konferensi pers.

Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, kesuksesan penerbitan SBP terjadi akibat dukungan dan terobosan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terus melakukan inovasi dalam pendalaman pasar modal untuk menopang misi pengembangan infrastruktur di Indonesia. Hal ini ditunjukkan OJK dengan dikeluarkannya Surat Efektif Nomor S-306/PM.21/2018 perihal Pencatatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Ciptadana Infrastruktur Indonesia yang berinvestasi pada Surat Berharga Perpetual yang diterbitkan PT PP (Persero) Tbk.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Merangkap Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Hoesen, mengatakan bahwa Surat Berharga Perpetual yang diterbitkan ini dapat menjadi *underlying* dari produk pengelolaan investasi di Pasar Modal yang juga ditujukan bagi pembiayaan infrastruktur seperti RDPT dan DINFRA. Pihaknya akan terus mendorong pemanfaatan berbagai instrumen di Pasar Modal dalam pembiayaan infrastruktur, mengingat Pasar Modal Indonesia memiliki berbagai instrumen pendanaan jangka panjang yang sesuai dengan karakteristik proyek-proyek infrastruktur. Selain itu, Hoesen juga mengapresiasi terobosan kreatif dalam pembiayaan proyek infrastruktur di Indonesia yang dilakukan Kementerian PPN/Bappenas dan berharap agar terobosan tersebut dapat menjadi inspirasi dan diikuti oleh BUMN atau swasta lainnya dalam pembiayaan berbagai proyek infrastruktur.

Dalam kesempatan yang sama, CEO PINA *Center for Private Investment* Eko Putro Adijayanto mengatakan momentum penerbitan Surat Berharga Perpetual tersebut dapat menjadi sentimen positif dan preseden yang baik dalam menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia. Pihaknya mengatakan akan terus melakukan sinergi dan koordinasi yang baik dengan OJK, Kementerian BUMN, dan *stakeholders* lainnya dalam menciptakan ekosistem pembiayaan investasi yang kondusif. “Dengan penerbitan Surat Berharga Perpetual ini melalui skema PINA, kami akan terus berinovasi dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur pemerintah dengan skema pembiayaan kreatif sesuai dengan kebutuhan, baik investor, pemilik proyek dan pihak terkait lainnya sehingga dapat menjadikan PINA sebagai salah satu terobosan dan solusi mengatasi gap pembangunan infrastruktur di Indonesia tanpa membebani anggaran negara,” tutup Eko.

Jakarta, 17 April 2018

Thohir Afandi  
Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan  
Kementerian PPN/Bappenas

Untuk informasi lebih lanjut:  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310  
Telepon: (021) 31936207, 3905650  
Faksimile: (021) 31901154  
Email: [humas@bappenas.go.id](mailto:humas@bappenas.go.id)